



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MASYHUDI
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG POLITIK, KEAMANAN, DAN PENEGAKAN HUKUM
3. NHK : 71200

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **19.490.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 309 m2/290 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.950.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 3.162 m2/162 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 7.300.000.000
4. Tanah Seluas 2.400 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
5. Tanah Seluas 7.500 m2 di KAB / KOTA KUTAI , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
6. Tanah Seluas 7.500 m2 di KAB / KOTA BANGGAI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **2.156.000.000**

1. MOTOR, HONDA WW 150 EXJ Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.5 HCVT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 495.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	626.942.460
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	22.272.942.460
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	22.272.942.460

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.